

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan memperoleh kejelasan hal yang melatarbelakangi perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby. Kedua putusan itu memiliki kesamaan alasan poligami yang diajukan pemohon, yaitu karena kebutuhan hasrat sexual yang tinggi. Penelitian ini mengkaji perbedaan dasar pertimbangan hakim pada kedua putusan serta pandangan jumah ulama tentang pertimbangan hakim pada kedua putusan. Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim menolak permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn adalah karena tidak terpenuhinya syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) dan syarat kumulatif Pasal 5 ayat (1). Pasal 4 ayat (2) tidak terpenuhi karena hakim menggunakan penafsiran ekstensif dengan memperluas makna "melaksanakan kewajibannya sebagai istri," yang tidak sebatas kewajiban melayani kebutuhan suami. Pasal 5 ayat (1) tidak terpenuhi karena penghasilan pemohon dianggap tidak mencukupi untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya jika berpoligami. Sebaliknya, Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan permohonan poligami karena terpenuhinya syarat Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1). Hakim melakukan penafsiran teleologis terhadap Pasal 4 ayat (2). Pasal 5 ayat (1) terpenuhi dikarenakan hakim berpendapat pemohon telah memenuhi semua syarat yang terdapat dalam pasal tersebut. Pendapat jumah ulama terhadap putusan hakim yang menolak atau mengabulkan permohonan poligami, sebagian ulama memperbolehkan poligami sebagai jalan alternatif bagi lelaki yang memiliki hasrat lebih dengan syarat harus berlaku adil dan memberikan nafkah yang cukup sedangkan sebagian ulama tidak memperbolehkan poligami jika dilakukan karena alasan memiliki kebutuhan hasrat biologis yang tinggi namun tanpa tujuan yang jelas. Disparitas putusan ini disebabkan peraturan perundang-undangan dan syarat yang bersumber dari diri hakim.

**Kata kunci :** Poligami, Pertimbangan Hakim, Disparitas

## ABSTRACT

This study aims to analyze and provide clarity on the reasoning behind two religious court decisions regarding polygamy. The decisions in question are Decision Number 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn and Decision Number 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby. Both cases involved applicants seeking permission for polygamy due to high sexual desire. The study explores the differences in the judges' reasoning in the two decisions and the views of the majority of scholars (jumhur ulama) regarding these decisions. The research is conducted using a normative legal research approach, specifically employing the statutory and case approaches. The findings reveal that Decision Number 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn was rejected because the alternative and cumulative requirements stated in Article 4 paragraph (2) and Article 5 paragraph (1) were not fulfilled. The interpretation of "carrying out her obligations as a wife" was expanded beyond the obligation to meet the husband's needs. In contrast, Decision Number 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby allowed polygamy as the requirements were met, with the judge making a teleological interpretation of Article 4 paragraph (2). The disparity in decisions can be attributed to the ambiguity of the law and variances in judges' understanding of polygamy requirements. Scholars' opinions on granting or rejecting polygamy applications also vary, with some permitting polygamy as long as it is conducted fairly and with adequate support and others opposing it if driven purely by biological desires without clear purpose.

**Keywords:** polygamy, judge's consideration, disparity